

HEGEMONI DUNIA ISLAM MELALUI GLOBALISASI ISU TERORISME DAN RADIKALISME

Kun Wazis

Fakultas Dakwah IAIN Jember
kunwazis@gmail.com

Judul : Terorisme dan Radikalisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi
Penulis : Achmad Jainuri
Penerbit : Intrans Publishing, Malang
Cetakan : 2016
Tebal : xii, 176 halaman

Dunia sedang dilanda kecemasan global atas isu besar dunia, yakni terorisme dan radikalisme. Bahkan, terorisme merupakan salah satu dari 10 isu global selain lingkungan hidup, ketahanan pangan, HAM, ketahanan energi, kemiskinan struktural, tata ruang, perdagangan manusia, krisis ekonomi yang merubah tata uang dunia, dan ledakan jumlah penduduk. Posisi terorisme sendiri disejajarkan dengan kejahatan narkoba. Karena itu, kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT) Sri Yudianto (2017) menggambarkan bahwa terorisme telah menyebar secara acak dan tak terduga menyerang kota-kota besar yang menjadi simbol-simbol peradaban dunia, seperti New York, Washington di Amerika, London, Paris, Madrid dan Brussel di Eropa. Di tempat lain, terorisme juga terjadi di tengah-tengah konflik sosial politik, yang bercampur isu keagamaan seperti di Nigeria, Somalia, Libya, Maroko, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu kemudian melebar ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordan, Libanon di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, India di Asia Selatan, Indonesia, Filipina dan Thailand di Asia Tenggara dan Australia. Serangan-serangan riil kemudian diikuti dengan ancaman-ancaman akan terjadinya serangan teror di negara-negara sekitar. Ratusan ribu korban tewas

dan luka dan ratusan ribu pengungsi harus meninggalkan negaranya untuk menghindari konflik dan kematian dan juga hancurnya fasilitas publik, infrastruktur akibat konflik dan terorisme.

Respon terhadap perkembangan aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia semakin gencar. Semunya elemen masyarakat menyalakan “api bahaya” atas isu ini. Sebagai contoh Deklarasi Aceh 26 April 2017 oleh 50 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang salah satu isinya melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN sejatinya sudah sejak lama dilakukan oleh santri. Tak berhenti di Deklarasi Aceh, perlawanan terhadap aksi terorisme dan radikalisme telah menjadi musuh bersama. Pada tanggal 26 September 2017, seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia mendeklarasikan anti radikalisme dan terorisme dari seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, di Nusa Dua, Bali. Pada puncak peringatan Sumpah Pemuda ke-89, 28 Oktober 2017 pemerintah kembali merespons isu tersebut dengan menggelar Kuliah Akbar Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme yang berlangsung serentak di seluruh kota-kota di Indonesia.

Sebelumnya, pada akhir pertengahan Desember 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Halaqah atau Pertemuan Ulama Se-ASEAN di Bogor Jawa Barat yang dihadiri 120 perwakilan pesantren-pesantren di Malaysia, Indonesia, dan Brunei, Jusuf Kalla mengajak agar menjadikan Islam moderat sebagai upaya menangkal radikalisme dan terorisme. Sebagaimana dilaporkan *Kompas* (15 Desember 2016) menyebutkan bahwa Islam moderat yang dimaksudkan Kalla adalah Islam yang mengedepankan perdamaian dan toleransi. Muslim yang moderat harus bisa menerima dan menghormati keberagaman. Hal itulah yang setidaknya dicontohkan Wali Sanga, sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka mengajarkan ajaran Islam dengan damai, dengan memanfaatkan keberagaman budaya di Indonesia, bukan dengan kekerasan, apalagi peperangan.

Fenomena keragaman bentuk kecemasan terhadap isu terorisme dan radikalisme inilah yang mencoba dibaca secara lebih kritis, mendalam, dan ringkas dalam buku Ahmad Jainuri sebagai pegangan agar tidak melihat sebuah isu secara telanjang yang tampil di permukaan, tetapi mengungkap

akar ideologi dan tuntutan aksinya. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini mengungkapkan bahwa terorisme sebagai bagian dari gerakan radikalisme paling mutakhir dan mencapai puncak ancaman peradaban ternyata tidaklah dibentuk oleh sebab yang tunggal. Selama ini, kebanyakan orang memandang terorisme semata-mata lahir dari pemahaman agama yang eksklusif yang disebutnya sebagai fundamentalisme agama. Pria kelahiran Lamongan 20 Desember 1951 dan pernah menjadi *Assessor for Professorship Promotion*, Universiti Malaya, Kualalumpur ini membongkar sebab-sebab yang multidimensi, mulai dari sebab kompleksitas gejala politik internasional, hingga hegemoni kapitalisme dalam ekonomi politik.

Narasi terorisme yang muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ditindas dibenarkan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, N. Jenny Hardjatno (2016), yang menyatakan bahwa pada umumnya kegiatan teror yang dijalankan secara berkesinambungan, sistematis, dan fanatik sebenarnya merupakan ekspresi protes dan pemberontakan terhadap suatu situasi tidak adil atau pincang, atau pertentangan ideologi baik dalam tataran nasional maupun internasional. Terlepas apakah setiap ideologi itu sendiri adil atau tidak adil. Oleh karena itu, keliru sekali memandang terorisme sebagai suatu fenomena yang terlepas dari proses sosial-politik, dan bahkan juga sosial-budaya.

Tenaga ahli pengajar Lemhanas RI ini menegaskan bahwa Anomali sosial-budaya itu tidak jatuh dari langit, melainkan mencerminkan kegagalan sosial-politik pada tingkat struktur kenegaraan maupun tatanan internasional. Jadi, jika ditinjau secara strategis, di satu sisi kegiatan teroris merupakan produk dari struktur sosial yang berdistorsi dan dinamika kebudayaan yang tidak utuh. Dan di sisi lain memang mempunyai tujuan untuk menegakkan suatu tatanan sosial dan tatanan normatif kultural yang menurut para teroris sendiri merupakan hal yang sempurna. Sebagai akibatnya, kegiatan teroris sebenarnya harus dipandang sebagai bagian kegiatan dari tatanan sosial budaya manapun baik di negara-negara maju, maupun di negara-negara yang masih 'tercecer'.

Jainuri menyatakan, "beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan

kekerasan bisa mengintimidasi musuh atau lawan untuk menakut-nakuti dan kemudian lawan merasa takut dan menyerah, maka biasanya orang tidak ragu menggunakan ancaman yang dimaksud. Dilihat dari jenisnya, ada dua macam terorisme: *state terrorism* dan *non-state terrorism*. Yang pertama biasanya menjadi instrumen kebijakan rezim penguasa dan negara, sedang yang kedua merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang.” (h. 120-121).

Fenomena terorisme yang dikemukakan Jainuri ditampilkan dengan memberikan contoh yang lebih umum atas realitas *state terrorism* dan *non-state terrorism*. Yang pertama biasanya mewakili penguasa penjajah, sedang yang kedua perlawanan dari rakyat terjajah. Dalam kasus konflik Israel-Palestina, kebijakan represif pemerintah Israel menduduki wilayah kedaulatan Palestina dinilai sebagai *state terrorism* oleh rakyat Palestina, sedang perlawanan rakyat Palestina terhadap kebijakan represif penguasa Israel dianggap teroris oleh Israel. Menurut Jainuri, sebagai sebuah label untuk tindakan kekerasan, istilah ini mencerminkan makna negatif bagi mereka yang dijuluki teroris. Dalam pengertian ini teroris disamakan dengan istilah menyakitkan lainnya dalam khazanah bahasa politik, seperti rasis, fasis, atau imperialis. Dalam dunia politik istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antara politikus yang bertikai. Seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan apabila tujuan teror ini berhasil, maka mereka tidak ragu untuk melakukan secara berulang tindakan teror terhadap lawan. Akibatnya, “sekali seseorang itu dituduh teroris maka orang yang menuduh dan yang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan.” (h. 121).

Aksi terorisme sebagai bagian dari perlawanan yang dikemukakan Jainuri dibenarkan Aleksius Jemadu. Dalam kolom opininya di Kompas 15 Desember 2016 berjudul “*Ancaman Terorisme Kian Nyata*”, Jemadu menegaskan bahwa terorisme yang berkembang di Indonesia tidak pernah lepas dari perkembangan politik internasional di berbagai belahan dunia. Terdapat empat fenomena penting yang berpotensi membawa efek peningkatan agresivitas kelompok terorisme di Indonesia. *Pertama*, terpilihnya Donald

Trump sebagai presiden AS yang baru dengan retorikanya yang kurang bersahabat dengan dunia Islam akan dijadikan justifikasi oleh kelompok teroris, khususnya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), untuk meneruskan perjuangan melawan hegemoni AS di seluruh dunia, termasuk pemerintah yang dianggap mendukung kebijakan negara adidaya tersebut. *Kedua*, prospek keamanan dan stabilitas di Timur Tengah semakin suram. Konflik yang berkepanjangan di Yaman, Suriah, Irak, Somalia, dan Libya akan menciptakan lebih banyak negara gagal (*failed states*) yang dijadikan basis perjuangan kelompok teroris untuk merekrut anggota baru. *Ketiga*, semakin terdesaknya posisi NIIS di Mosul akibat serangan pasukan Pemerintah Irak dan melemahnya basis pertahanan kelompok pemberontak di Aleppo oleh tentara Suriah telah mendorong pemimpin NIIS Abu Bakar al-Baghdadi mencari markas perjuangan yang baru di luar Timur Tengah. *Keempat*, penindasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya di Provinsi Rakhine telah dijadikan alasan oleh kelompok teroris untuk membenarkan ekspansi aktivitasnya di Asia Tenggara tidak hanya terhadap Pemerintah Myanmar, tetapi juga negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang dianggap kurang peduli dengan nasib kaum Rohingya.

Sedangkan mengenai radikalisme, menurut Jainuri, dalam sejarah umat manusia, termasuk umat Muslim, selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai paling benar dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan hanya saling berbicara dengan kelompok sendiri. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran lain, selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh dari figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu, biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Di sini berlaku prinsip “melihat orang yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan.” Dalam dialog biasanya ia tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, tetapi ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan dan pendapat menurut standar diri sendiri, bahkan dengan memaksakan kehendaknya (h. 4-5).

Berbeda dengan radikalisme tindakan dan gerakan yang ditandai oleh aksi ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Orang ekstrem biasanya reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan kekerasan dalam menjawab persoalan. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal sesungguhnya juga didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya. Gerakan radikal bertujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan, yang berbeda dengan yang ada.

Mendasarkan definisi ini, Jainuri ingin menegaskan bahwa radikalisme bisa muncul dalam setiap diri manusia, yang beragama (baik muslim maupun non muslim), kelompok suku, ras, dan siapapun manusia yang memiliki ciri-ciri yang diletakkan oleh Jainuri. Sebab, hakikatnya radikalisme akan nampak dalam bentuk ide dan gerakan. Keduanya ditemukan dalam orientasi ideologi keagamaan kaum konservatif, tradisionalis, nasionalis, modernis, liberalis, maupun globali. “Kengototatan” dalam mempertahankan ideologi dan memaksakannya kepada pihak lain untuk menerima ide dan tindakan salah satu pihak adalah sikap yang ditemukan juga pada kalangan modernis, liberalis, maupun globali. Karenanya tidak benar kesan yang menyatakan bahwa radikal adalah sikap yang hanya ditemukan pada kaum konservatif, tradisionalis, dan nasionalis. Dengan dukungan media, dalam kasus Islam, kesan seperti itu menyebar luas dan membentuk *stereotyping* seakan kelompok radikal berasal dari Islam konservatif, tradisionalis, dan purifikasionis. Atas dasar ini gerakan yang “dilabeli” sebagai radikal dipandang sebagai ancaman yang paling menakutkan dan karena itu harus dibasmi dengan cara di luar batas koridor hukum normal (h. 159).

Menurut Jainuri, kesan seperti ini mendorong munculnya upaya dan gerakan deradikalisasi. Tujuan deradikalisasi sesungguhnya adalah untuk menjamin agar kehidupan masyarakat terhindar dari konflik karena semata mempertahankan ideologi keagamaan yang dianggapnya paling benar yang dimiliki seseorang atau kelompok selama ini. Dalam kenyataannya, deradikalisasi menjadi “kontra-produktif” yang kenyataannya tidak menghilangkan fenomena radikalisme secara tuntas, tetapi sebaliknya semakin men-

jamur, atau paling tidak, tetap hidup dan bahkan mungkin berkembang. Bersamaan dengan kondisi ini, kritik Jainuri, maka “proyek” deradikalisasi akan tetap ada. Disamping itu, fakta beberapa kejadian tingkat global maupun nasional, kesan hadirnya gerakan radikal demi kepentingan kelompok tertentu. Setidaknya, pengalaman ini pernah terjadi di Mesir, Maroko, dan Indonesia (terutama masa rezim Orde Baru). Karena ada pihak yang diuntungkan, maka radikalisme tidak akan pernah berakhir. Ada hubungan ideologis antara fundamentalisme, radikalisme, dan tindakan kekerasan sebagai ekspresi kritik mereka terhadap status quo. Meskipun gerakan radikal memperoleh legitimasi dari pemahaman keagamaan mereka, tetapi faktor dominan yang mendorong mereka melakukan aksi kekerasan karena situasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang mereka hadapi, terutama di kawasan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim (h. 160).

Secara kritis, Jainuri menandakan bahwa radikalisme bisa ditemukan dalam fenomena yang beragam dan tidak semata dalam ekspresi politik, yakni ingin mendirikan negara Islam. Sebuah alasan yang sering dipakai oleh kalangan tertentu dalam mengatasi gerakan radikal Islam. Jainuri mencatat, gerakan radikal Islam itu muncul karena, para pelaku gerakan ini, merasa tidak memiliki peran serta dalam memecahkan persoalan mereka sendiri. Kondisi ini menjadikan mereka mengisolasi diri, reaktif dalam merespons persoalan, dan (biasanya) melakukan kekerasan dalam memecahkan persoalan. Oleh karena itu, apabila akar persoalan yang mendorong munculnya radikalisme bisa diatasi, maka gerakan radikal tidak akan pernah ada (h. 160).

Umat Islam Dicitrakan dengan Teror dan Radikal

Media massa menjadi kekuatan membangun pesan dan persepsi publik yang diglobalkan oleh Barat untuk mendeskreditkan umat Islam dengan label isu terorisme dan radikalisme. Jainuri mengungkapkan realitas yang paradoks atas berbagai aksi teror di dunia Barat yang sejatinya didominasi oleh non muslim, tetapi dikonstruksikan melalui media seakan-akan yang banyak melakukan aksi teror adalah umat Islam. Pada dekade setelah peristiwa 11 September 2001, ekstremis sayap kanan Amerika Serikat telah membunuh banyak warga Amerika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh mereka yang mengaku beridentitas muslim. Untuk mendukung kenyataan ini, Jainuri

mengemukakan hasil penelitian Duke 2015, *Law Enforcement Assesment of the Violent Extrimist Theat*, 74% adalah kaum ekstremis anti-pemerintah sebagai ancaman teroris yang paling berbahaya; dibandingkan dengan 39% kekerasan yang dilatarbelakangi oleh agama (h. 60).

Menurut Jainuri, perbandingan yang tidak seimbang ini berbeda dengan berita sehari-hari yang dipublikasikan oleh media Barat dalam memberitakan serangan kaum teroris. Menurut penelitian dari Media Tenor menyebutkan sembilan dari sepuluh berita yang disiarkan tentang muslim dan Islam di USA, Inggris, dan Jerman adalah terkait dengan perang atau terorisme. Meskipun demikian, kata Jainuri, perbandingan ini tidak berarti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kaum radikali muslim bisa ditoleransi, tetapi sama seperti tindakan radikal yang dilakukan oleh kelompok lain, semuanya adalah tindakan yang harus ditindak. Meskipun fakta di atas sesungguhnya menggambarkan ketidakseimbangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umat Muslim dan orang-orang Barat sendiri, namun berita yang dilansir oleh media selalu menekankan kekerasan itu pada Islam dan umat Muslim. Pada akhirnya *stereotyping* Islam sama dengan ideologi kekerasan selalu mewarnai berita-berita Barat dan belahan dunia non-Barat. Jainuri mengutip hasil penelitian Ilmuwan komunikasi di Indonesia menyikapi secara kritis terhadap globalisasi isu terorisme yang disalurkan melalui konstruksi realitas media massa, terutama perspektif subyektif pers Barat. Situasi seperti ini dapat menumbuhkan kebencian dari sebagian umat Muslim dan menganggapnya sebagai tidak adil dan bahkan fitnah, aspek yang selalu dijadikan alasan kaum radikali melakukan aksi teror. Fenomena ini dinilai oleh Jainuri bahwa kemajuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara Barat yang seharusnya (h. 60)

Politik media massa Barat yang mendeskreditkan umat Islam dengan isu terorisme dan radikalisme sudah sering kali dilakukan dan mendapatkan kritik keras dari sejumlah kalangan di dunia. Begawan komunikasi Indonesia Deddy Mulyana (2008) secara kritis media Barat yang membangkitkan wacana ketakutan terhadap Islam (*Islamophobia*) dengan menyatakan bahwa bagi media Barat, Islam mungkin adalah agama yang sarat dengan kekerasan atau disamakan dengan terorisme. Media Barat, terutama Amerika, sering memaknai Islam sebagai agama primitif yang membenarkan perbudakan,

poligami, harem-harem, penindasan wanita, kekerasan, dan terorisme. Para pengelola media Barat, baik cetak maupun elektronik, sering mengasosiasikan apa yang dilakukan oleh kaum Muslim sebagai representasi Islam, apalagi bila sang aktor adalah pemimpin muslim. Dalam pandangan media Barat, apa yang dilakukan Saddam Hussein, Amrozi atau Imam Samudra adalah representasi Islam. Maka yang terjadi adalah pertarungan makna. Pemenangnya, bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang berkuasa. Maka tidak mengejutkan bila Amerika Serikat sebagai “Sang Tuan” dunia lewat media memaksakan definisinya sendiri mengenai tindakan apa saja yang termasuk terorisme dan siapa yang dapat dijuluki teroris.

Untuk mendukung fenomena isu terorisme dan radikalisme yang diarahkan kepada umat Islam, Jainuri mengutip hasil penelitian Busro Muqoddas yang dibukukan dengan judul “*Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad*” bahwa aksi terorisme di Indonesia merupakan konstruksi intelijen negara sendiri. Penelitian membuktikan bahwa kelompok radikal Islam yang direkrut menjadi teroris kemudian melakukan pemboman adalah buatan intelijen. Menurut Busro, kata Jainuri, intelijen menciptakan suasana yang menyudutkan kalangan ekstremis Islam. Mereka didiskriminasi agar timbul kebencian kemudian diprovokasi untuk membentuk negara Islam di Indonesia dan melawan negara. Jainuri menegaskan, “jika benar skenario ini, sesungguhnya ada “kebijakan” yang sama dengan yang dilakukan oleh beberapa rezim penguasa Muslim secara internasional. Bahkan, di negara tertentu gerakan kaum radikal ini secara politis dikategorikan sebagai kelompok oposisi radikal, dan karenanya harus disingkirkan” (h. 61).

Fakta lain yang ditampilkan adalah isu terorisme dan radikalisme yang direkayasa menjadi bara konflik politik di Timur Tengah (Arab Spring). Dengan memotret gejolak di Syria, Jainuri menukil pandangan Dr. Taufiq Ramadan al-Buthi, putra ulama terkemuka Suriah, almarhum Syekh Ramadhan al-Buthi yang mengisahkan detik-detik akhir kematian ayahnya secara syahid di tangan kelompok radikal. Berbagai tuduhan miring ditujukan kepada almarhum termasuk pembakaran buku-bukunya. Padahal, sikap almarhum sangat netral dalam konflik Syria. Ia tidak condong kepada salah satu pihak terkait krisis yang melanda Syria. Jainuri mengutip pernyataan Dr. Taufiq bahwa, “ada agenda besar dibalik berkobarnya fitnah di Syria.... Dr. Taufiq

seakan berkesimpulan bahwa keterlibatan negara-negara Barat dalam penyelesaian konflik di kawasan Islam, terutama Syria, bukan untuk kepentingan masyarakat Syria tetapi adalah untuk kepentingan Barat sendiri” (h. 14-17)

Berkedok isu terorisme dan radikalisme itu, Barat menjadikan jalan untuk menguasai kawasan Islam. Dalam hal ini, Jainuri menawarkan pertanyaan kritis dan diberikan jawaban yang kompleks, “pertanyaannya adalah mengapa Barat begitu bernafsu memperlemah dan menguasai kawasan Islam.” Atas pertanyaan ini, Jainuri memberikan dua jawaban mendasar. *Pertama*, untuk jangka pendek, Barat ingin terjaminnya pasokan kebutuhan sumber daya alam (minyak dan gas) dari negara-negara muslim. Hal ini bisa dijamin apabila negara-negara di kawasan penghasil minyak tersebut secara ideologis memiliki kesamaan dan menerima sistem demokrasi Barat serta loyal kepada Barat. Oleh karena itu, Barat tidak menginginkan apabila Iran dan Iraq, yang memiliki orientasi ideologi keagamaan yang sama, yakni Syiah, tidak hanya berbeda secara ideologis dengan negara yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga dianggap membahayakan kepentingan politik Barat. *Kedua*, Barat sangat mewaspadaai bangkitnya kekuatan peradaban baru Islam. Bagi Barat kebangkitan ini tidak boleh terjadi, karena hal ini akan mengancam peradaban modern Barat, sekaligus juga mengganggu hegemoni Barat (h. 17-20).

Alasan pertama, Jainuri mengungkap banyak realitas yang mendukung kepentingan Barat agar negara muslim tunduk kepada sistem demokrasi Barat, salah satunya bentuk standar ganda (*double standard*) yang diterapkan Barat, terutama Amerika Serikat yang diterapkan kepada negara yang dinilai radikal dan tidak berpihak kepada kepentingan Barat. Kasus tidak diakui kemenangan FIS (Partai Islam di Aljazair) dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, kata Jainuri, melalui sistem demokrasi dalam pemilihan umum di kedua negara tersebut adalah contoh penerapan standar ganda Barat. Alasan kedua, disebutkan bahwa kekhawatiran Barat akan kebangkitan Islam dipicu oleh kekuatan dunia Islam yang memiliki lima potensi besar dalam melahirkan peradaban baru. *Pertama*, nilai ajaran Islam yang diyakini umat Muslim sebagai ajaran yang mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat, ritual dan sosial kemasyarakatan. *Kedua*, sumber daya alam (*natural resources*) yang dimiliki oleh negara-negara Muslim yang sebagian besar sumber alam ini san-

gat dibutuhkan oleh negara-negara industri Barat. *Ketiga*, sumber daya manusia (SDM) muslim yang saat ini mencapai kurang lebih satu setengah milyar orang dari penduduk dunia yang mencapai tujuh milyar. Jika SDM ini dikelola dengan baik, maka tidak diragukan lagi umat Islam akan menjadi umat yang sejajar dengan mereka yang ada di Barat. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim yang sangat erat berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara Muslim. *Kelima*, pengalaman sejarah masa lalu, dimana pada saat Barat menjajah dunia Timur, termasuk dunia Muslim, resistensi paling keras berasal dari kaum muslimin. Salah satu faktor yang mendorong perlawanan ini adalah semangat ajaran Islam yang melarang seseorang atau bangsa mengeksploitasi dan menjajah orang atau bangsa lain (h. 17-27).

Jainuri membeberkan kecemasan Barat atas potensi umat Islam tidak hanya didasarkan pada realitas empiris kekuatan umat Islam. Dengan mengungkapkan pandangan Richard Nixon dan Kishore Mahbunani, Jainuri memaparkan bahwa tidak bisa dibayangkan bahwa ternyata masyarakat Barat, terutama Amerika Serikat, setelah era kolonialisme terjangkit perasaan takut yang luar biasa mengenai masa depan peradaban mereka. Ketakutan ini, selain karena potensi yang dimiliki umat Muslim yang besar, juga dibentuk oleh stereotyping kaum Muslim sebagai bangsa yang “tidak beradab”, barbar, dan tidak rasional. Sekarang mereka menjadi sebuah kekuatan geopolitik yang fanatik dan monopolistik, yang jumlahnya terus bertambah dan yang kekuatan finansialnya sangat signifikan serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat merupakan ancaman besar bagi Barat. Disamping itu, rasa percaya diri Barat untuk tetap menjadi kekuatan dominan pada abad ke-21, sebagaimana terjadi sejak dua atau tiga abad yang lalu, secara tidak langsung telah menimbulkan kekhawatiran diri terhadap kekuatan baru yang muncul di kawasan non-Barat, seperti menjamurnya gerakan militan Islam, dan bangkitnya Asia Timur. (h. 29).

Opini yang dikembangkan media massa Barat didukung dengan pemetaan kelompok Islam di dunia sebagaimana yang dilakukan oleh Road Corporation, sebuah lembaga riset di Amerika Serikat yang mengkaji perkembangan Islam sejak tahun 2003. Dalam laporannya yang diberi judul “Civil Democratic Islam” mereka membagi umat Islam ke dalam empat ke-

lompok, yakni fundamentalis, tradisional, modernis, dan sekularis. Kelompok fundamentalis atau sering disebut kaum radikal dimaknai sebagai kekuatan umat Islam yang menolak demokrasi dan budaya Barat, menginginkan sebuah negara otoritarian yang menerapkan hukum Islam, serta menggunakan penemuan dan teknologi untuk mencapai tujuannya. Kelompok tradisional didefinisikan sebagai masyarakat yang konservatif, mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan. Kelompok modernis menginginkan dunia Islam menjadi bagian modernisasi global yang menghendaki modernisasi Islam dan mereformasi Islam dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Kelompok sekularis diidentifikasi sebagai kelompok yang menginginkan dunia Islam dapat menerima pemisahan antara agama dan negara, seperti yang dilakukan negara-negara Barat, dengan memosisikan agama sebagai urusan individu saja. Pemetaan ini pun melahirkan dikotomi friksi diantara umat Islam dan saling klaim kelompok identitasnya yang benar.

Mewaspadaai Rekayasa Dibalik Isu Terorisme dan Radikalisme

Jainuri menegaskan bahwa munculnya gerakan radikal dalam bentuk terorisme merupakan gejala kebangkitan dalam melawan ketidakadilan, penindasan, dan fitnah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal maupun dunia terhadap bagian masyarakat Muslim. Pada intinya, seua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari proses kemanusiaan dan perubahan budaya. Dalam setiap masyarakat di dunia ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Jalan terorisme dipilih untuk melawan ketidakadilan tersebut disebabkan tiga faktor. *Pertama*, doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan menjadi motivasi dan faktor penting yang mengilhami para pelaku teror, yang sering, menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri. *Kedua*, lemahnya kaum muslim, yang oleh para tokoh kaum radikal, dikarenakan kemerosotan moral para elit penguasa muslim sebagai boneka negara Barat, bukan hanya karena sistem pemerintahan sekuler yang mereka terapkan, tetapi juga karena kebijakan pemerintahannya yang dinilai lebih menguntungkan Barat dari pada rakyat sendiri. *Ketiga*, pengakuan objektif kaum radikal terhadap dunia non-muslim Barat yang telah mencapai pun-

cak kemajuan, baik di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan stabilitas politik. Tetapi, kemajuan itu digunakan untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Timur (Islam) dan Barat dalam kurun waktu yang cukup lama (h.88-90).

Mengutip pandangan Bemman & Bar, Jainuri menampilkan tiga aspek penting munculnya aksi terorisme di dunia Muslim. *Pertama*, sebab politik yang didominasi oleh konflik berkepanjangan Arab-Israel dan campur tangan politik dan militer Amerika Serikat di Negara-negara Muslim. *Kedua*, sebab budaya, yakni perlawanan terhadap kolonialisme budaya Barat. *Ketiga*, sebab sosial karena kemiskinan dan alienasi. Sementara tidak satupun tokoh politik di Barat yang menolak perang terhadap terorisme, pada saat yang sama, secara politik mereka juga membenarkan bahwa “kekecewaan dan perasaan sakit masyarakat muslim,” karena perlakuan tidak adil pada tiga aspek tersebut, menjadi alasan rasional yang memberikan legitimasi tuntutan aksi tindakan terorisme (h. 90).

Dalam konteks global, Jainuri mencontohkan aksi terorisme dan radikalisme dengan fenomena *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang muncul dalam situasi politik Iraq yang kacau, sejak penyerbuan tentara Amerika Serikat tahun 1990-an. Dari perspektif pervasiveness, sebagai salah satu ciri radikali revivalis, ISIS merupakan gerakan fundamentalis-radikalis yang muncul dalam fenomena politik. Informasi tentang ISIS begitu cepat menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan persepsi yang beragam bagi mereka yang mengikuti perkembangannya. Beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jerman dan juga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh ISIS sebagai teroris. Tetapi, sebagian yang lain menganggapnya sebagai gerakan yang wajar karena ingin membebaskan diri dari ketidakadilan, represif, dan fitnah. Alasan ini dikemukakan karena ISIS merasa ketidakadilan yang mereka terima dari kebijakan pemerintahan mayoritas Syiah Iraq. Karena itu, bersama-sama dengan beberapa kelompok perlawanan kemudian menyatu menjadi ISIS. Meskipun, tidak bisa diingkari bahwa dalam sejarah pertumbuhannya, inti dari ISIS ini sebenarnya berasal dari Al-Qaeda Iraq, sebagai bagian dari Al-Qaeda Mesir dibawah kepemimpinan Ayman al-Zawahiri. Namun, karena perjuangan Al-Qaeda Iraq dinilai oleh al-Zawahiri telah menyimpang dari prinsip perjuangan melawan

musuh utama Al-Qaeda, maka pada 2014 Al-Qaeda Iraq diputus hubungannya dengan Al-Qaeda Mesir (h. 143-145).

Persoalannya adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ISIS ternyata tidak hanya kepada sasaran utama (*symbolic targets*), yakni tentara pendudukan Amerika dan sekutunya di Iraq (versi Al-Qaeda) dan pemerintah mayoritas Syiah di Iraq (yang menjadikan alasan berdirinya Islamic State of Iraq, ISI) tetapi juga kepada mereka yang tidak berdosa (*targets of opportunity*), yang tidak ada hubungannya dengan musuh utama. Dalam perspektif terorisme, sasaran ini dijadikan target untuk menunjukkan kepada kelompok lain bahwa ISIS akan bisa melakukan hal yang sama kepada siapa saja yang tidak mendukung gerakan ISIS. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara acak ini bertujuan untuk menakut-nakuti mereka yang tidak mendukung dan melawan ISIS. Di sini berlaku prinsip *the friend of my enemy is my enemy* (teman musuh saya adalah musuh saya). Kenyataannya, ISIS tidak peduli dengan kritik dan sorotan tajam dari masyarakat dunia tentang kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak berdosa, seperti anak-anak dan kaum wanita. Sasaran terhadap yang terakhir ini dinilai kalangan sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena sebagian besar korban kekerasan dari sasaran kedua yang dilakukan oleh ISIS ini tidak didasarkan pada ketiga prinsip alasan normatif agama (ketidakadilan, represif, dan fitnah) (h. 145).

Berdasarkan paparan akar ideologi dan tuntutan aksi yang muncul dari aksi terorisme dan radikalisme, Jainuri ingin mengajak umat Islam agar waspada terhadap kepentingan politik yang bersembunyi dibalik gegap gempita dua isu tersebut yang selalu diarahkan untuk memperlemah umat Islam. Jainuri memaparkan praktik politik penjajahan kolonial Belanda terhadap yang melarang umat Muslim berpolitik praktis, pendirian partai politik tidak diijinkan, dan simbol-simbol Islam yang dianggap membahayakan kekuasaan juga disensor untuk tidak muncul di publik, serta pencekalan terhadap publikasi yang masuk ke Indonesia dari Timur Tengah (Mesir), yang dianggap menumbuhkan semangat nasionalisme dan anti kolonialisme.

Pada masa rezim Orde Baru rekayasa peristiwa dilakukan dalam rangka memperlemah potensi politik umat Muslim. Rekayasa ini seiring dengan pendeskreditan umat Muslim pada tingkat global melalui pelabelan (*stereotyp-*

ing) umat Muslim sebagai kaum fundamentalis yang anti demokrasi dan melakukan kekerasan dalam perebutan kekuasaan. Tujuan dari pelabelan ini ingin menunjukkan bahwa Islam itu identik dengan fundamentalis, akrab dengan kekerasan kaku, merasa benar sendiri, non-kompromis dalam bersikap, semuanya ini merupakan ciri yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pluralisme. Di masa Orde Baru muncul berbagai peristiwa yang dikaitkan dengan umat Muslim: komando jihad, teror Warman, Warsidi Lampung, pembajakan Woyla. Ada yang menengarai bahwa sebagian peristiwa itu adalah rekayasa. Rezim penguasa hanya ingin menciptakan alasan untuk menindak para pelaku peristiwa sebagai pintu masuk memperlemah kekuatan politik umat. Target sesungguhnya adalah menumbuhkan kesan bahwa Islam identik dengan pemberontakan, kekerasan, dan anti pembangunan (h. 36-37)

Dengan menawarkan pandangan kritis, Jainuri melihat praktik kekuasaan yang berpotensi memperlemah umat Islam dan memperkuat kekuasaan yang sedang bekerja. Kontrol untuk memperlemah kekuatan umat Muslim menjadi kebijakan yang terus dilakukan oleh para rezim penguasa. Pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua (2009-2014) pernah diwacanakan untuk mengontrol umat Muslim melalui sertifikasi ulama. Karena reaksi masyarakat yang sangat keras, rencana ini pelan tapi pasti tidak berlanjut, terbukti sampai akhir masa jabatan SBY gagasan ini tidak terealisasikan. Melalui kebijakan sertifikasi ulama, paham dan pandangan keagamaan yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui khotbah, veramah, dan pengajian akan bisa dikontrol oleh pemerintah. Efektifitas pengawasan ini akan berakibat pada pembatasan-pembatasan kehidupan keberagaan kaum muslim, yang pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dulu diatur dalam berbagai Ordonantie (h. 40-41).

Jainuri juga memotret rezim saat ini, yang mengatakan bahwa berbeda dengan rezim SBY, era pemerintahan presiden Joko Widodo nampaknya berusaha memperlemah potensi persatuan umat Islam melalui kebijakan *divide et impera* atau politik pecah belah dengan mengakomodasi kepentingan dan aspirasi sebagian kelompok muslim, dengan mengabaikan kelompok muslim yang lain. Pengakomodasian paham keagamaan dalam struktur negara, yang dikaitkan dengan aspirasi komunitas muslim tertentu, adalah gam-

baran dari politik pecah belah dimaksud, karena kenyataannya mengandung reaksi ketidaksetujuan dari komunitas yang lain. Meskipun kemungkinan reaksi itu sudah diketahui oleh rezim penguasa, tetapi hal itu tidak menyurutkan niat pemerintah untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bukti kebenaran tujuan kebijakan ini, yakni terbelahnya kekuatan umat muslim. Kebijakan “inkuisi” itu juga secara simbolik bisa dimaknai sebagai bagian dari keinginan rezim penguasa untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahannya adalah “agamis.” Hal ini sekaligus menghapus anggapan bahwa presiden Joko Widodo berideologi “merah” seperti yang dikesankan oleh sebagian orang selama ini. Upaya mengakomodasi pikiran dan tradisi Islam dari sebagian umat Muslim dimaksudkan untuk menghilangkan kesan di atas (h. 41).

Jainuri mengingatkan, jika kebijakan terhadap umat Islam di Indonesia terus melanggengkan “Politik Islam Penguasa” yang memecah belah, selain menguntungkan kelompok kepentingan yang menginginkan potensi politik umat melemah, karena perpecahan, juga dikhawatirkan bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selalu ditekan keutuhannya (42-43). Fenomena penggunaan terorisme dan radikalisme ini untuk menguasai Indonesia beberapa kali disampaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional dengan isu terorisme, hak azasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, dan sebagainya adalah bentuk perang *proxy* (*proxy war*) yang dapat dilakukan oleh pihak asing terhadap Indonesia. *Proxy War* merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah. Nurmantyo juga menilai bahwa perang *proxy* yang dilakukan di Indonesia ditempuh dengan jalan membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, memutarbalikkan sejarah, serta membuat kegaduhan di masyarakat (*Pikiran Rakyat*, 24 November 2016).

Sebagai kajian kritis, pandangan Jainuri menawarkan cara pandang yang mengungkapkan makna relasi kuasa dibalik isu terorisme dan radikalisme yang selama ini ditampilkan dalam kancah ruang publik. Untuk itu, karena bisa dimuati dengan kepentingan politik tertentu, isu terorisme dan radikalisme-

me harus dilihat dari siapa yang berkepentingan atas isu tersebut, termasuk didalamnya yang bertujuan untuk memaksakan menyandingkannya dengan ajaran Islam dan umat Islam. Sebab, sejak awal, pemahaman Islam (Islamisme) adalah Islam yang *rahmatan lil alamin*, bukan terorisme maupun radikalisme. Tetapi, karena mengusung kepentingan politik kotor tertentu, kedua isu “paham kekerasan” tersebut dapat digunakan sebagai alat memecah belah Islam dan kaum muslimin agar kekuatan kebangkitan Islamnya menjadi lemah. “*Karena ada pihak yang diuntungkan, maka radikalisme tidak akan pernah berakhir,*” demikian penegasan Jainuri dalam catatan penutupnya (h. 160) (*).

